



# DINAMIKA & TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA : (UPAYA MENUJU DEMOKRASI BERKEADABAN)

Oleh :  
Dr. Epin Saepudin, M.Pd

# APA, MENGAPA & BAGAIMANA DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI?

## Harapan

KEHIDUPAN ADIL, TENTERAM, AMAN DAN SEJAHTERA

PEMERINTAHAN BERJALAN SELARAS DENGAN HARAPAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

TATA KEHIDUPAN YANG :  
BER-KETUHANAN, BER-PERIKEMANUSIAAN,  
BER-PERSATUAN, PERMUSYAWARATAN,  
BER\_Keadilan Sosial

## Kenyataan

DEMOKRASI PROSEDURAL

DEMOKRASI TRANSAKSIONAL :  
PEMERINTAHAN ADALAH  
BAGAIMANA KEHENDAK PENGUASA  
(MENGESAMPINGKAN RAKYAT)

DEMOKRASI TANPA LANDASAN  
IDEOLOGI

**PERLU PEMAHAMAN AKAN MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI DALAM  
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK MENGANGKAT HARKAT DAN  
MARTABAT BANGSA INDONESIA**

# KERANGKA KONSEPTUAL

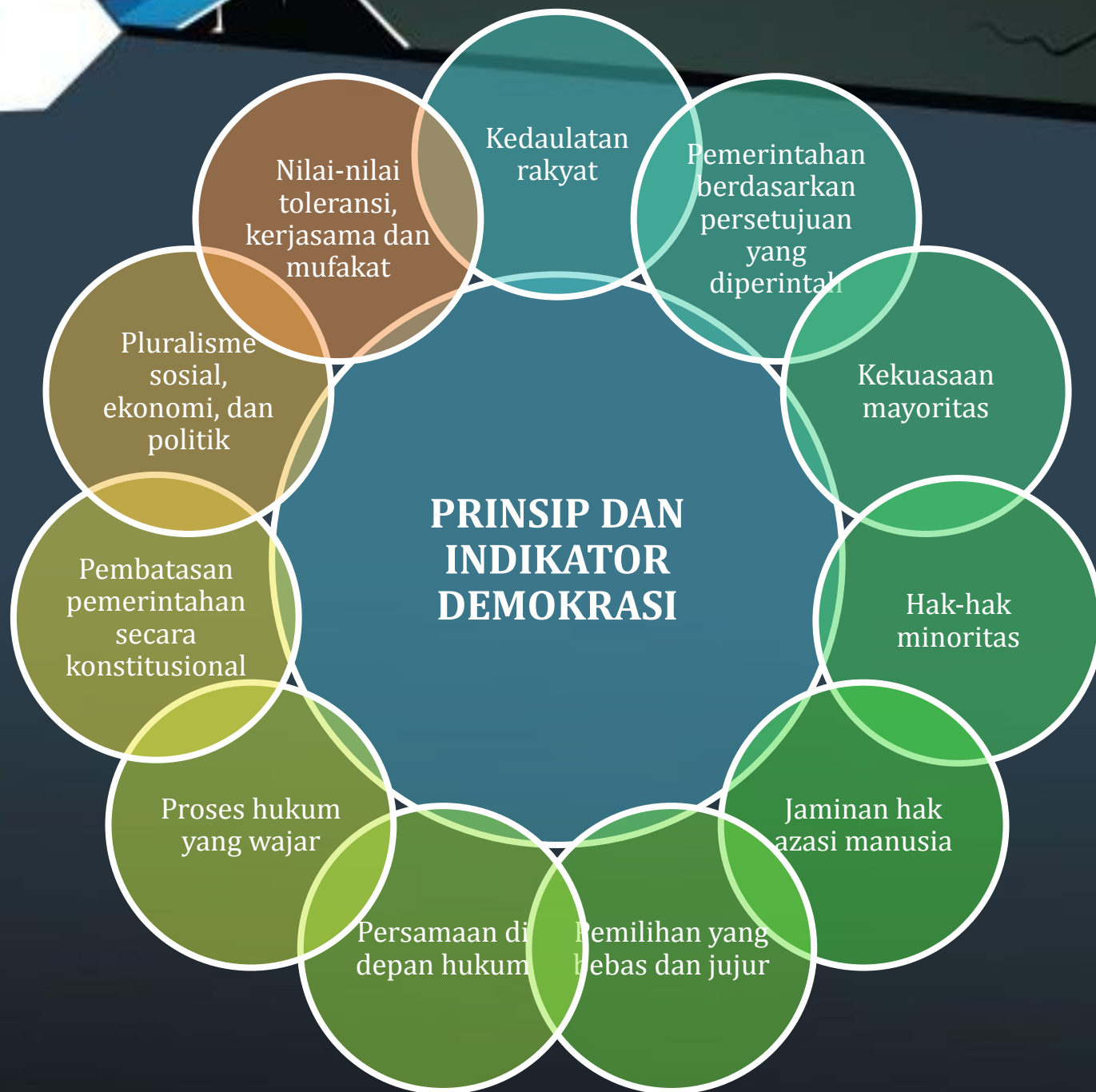


# KONSEP DASAR DEMOKRASI, Abraham lincoln



Gagasan klasik demokrasi □ memandang bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung (Sartori dalam Hardiman, 2009)





DEMOKRASI  
LIBERAL  
(1945-1959)

## PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

DEMOKRASI  
TERPIMPIN/ORLA  
(1959-1965)

ERA REFORMASI  
(1998-sekarang)

ORDE BARU  
(1966-1998)

Model demokrasi yang harus dikembangkan adalah model demokrasi yang bersumber dari falsafah, jatidiri, dan identitas bangsa Indonesia (PANCASILA)

DEMOKRASI INDONESIA HARUS MAMPU HIDUP DAN BERKEMBANG DALAM KERANGKA PANCASILA YANG SARAT NILAI RELIGIUSITAS, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, HIKMAT KEBIJAKSANAAN DEMI TERCAPAINYA KEADILAN SOSIAL YANG MENAMPILKAN KESANTUNAN, TOLERANSI, MENGHARGAI PERBEDAAN, DAN KEMAMPUAN UNTUK HIDUP BERDAMPINGAN DALAM KEBERAGAMAN (GOTONG-ROYONG).



# REFLEKSI HARI LAHIR PANCASILA DALAM MENYONGSONG PILKADA SERENTAK

Oleh : Epin Saepudin, M.Pd

Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Demokrasi saat ini dianggap sebagai sistem terbaik yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara sejahtera. Demokrasi sebagai cara untuk mencapai cita-cita bangsa, hendaknya tidak terlepas dari ideologi dan jatidirinya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai alat teknis, tetapi juga merupakan cerminan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia. Akan tetapi, terdapat suatu kecenderungan yang nampak saat ini bahwa dalam praktiknya, "demokrasi" ditempatkan sebagai tujuan kehidupan bernegara bahkan terkesan dianggap sebagai ideologi bangsa, padahal sesungguhnya yang menjadi tujuan dalam bernegara adalah membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, yang adil berdasarkan Pancasila. Karena itu, secara tegas kita meyakini bahwa ideologi kita adalah "Pancasila" dan bukan "Demokrasi".

Salah satu topik yang hangat diperbincangkan saat ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar menjelang akhir tahun 2015. Disatu sisi Pilkada serentak dianggap sebagai suatu bentuk pembaruan praktik demokrasi di Indonesia, akan tetapi disisi lain pelaksanaan Pilkada baik serentak ataupun tidak tetap mempunyai potensi munculnya konflik seperti yang sering terjadi pada Pilkada-Pilkada sebelumnya yang sarat kecurangan. Masalah yang dapat muncul dalam pelaksanaan Pilkada

serentak ini setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yakni sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan dan setelah dilaksanakannya pemungutan suara.

*Pertama*, pada saat sebelum pemungutan suara. Masalah yang muncul biasanya seputar penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditengarai dihasi oleh kecurangan-kecurangan/manipulasi. *Kedua*, ketika pelaksanaan pemungutan suara dimana peluang terjadinya politik uang (*money politic*) atau dikenal dengan istilah "serangan fajar" pada hari dilaksanakannya pemungutan suara amat dimungkinkan. Terlebih, pelaksanaan Pilkada serentak yang secara legal formal diatur dalam UU No 1 Tahun 2015 jo UU No 8 Tahun 2015 ini dilakukan satu putaran dalam rangka efisiensi waktu dan anggaran. Akan tetapi, disamping sisi positif dari segi efisiensi, sistem seperti ini ditengarai menjadi titik pangkal terjadinya kecurangan. Masing-masing calon yang maju dalam pemilihan dimungkinkan melakukan upaya maksimal agar dapat memenangkan kursi nomor satu di daerahnya. Maka peluang terjadinya penggunaan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh UU tidak dapat terelakkan. *Ketiga*, konflik setelah pemungutan suara. Masalah yang muncul biasanya terkait dengan hasil penghitungan suara yang seringkali berujung di pengadilan dan berpotensi terjadinya bentrok antarmassa pendukung.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa hingga saat ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia seakan belum menemukan bentuknya, dalam arti masih dalam proses pencarian jatidiri. Padahal, Bung Karno pernah mengatakan bahwa jikapun kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi perwujudan yang memberi hidup (Demokrasi Pancasila). Akan tetapi, pemikiran mengenai demokrasi Pancasila yang sering digembor-gemborkan nampaknya hanya berhenti pada tataran konseptual. Realitas menunjukkan bahwa kita seringkali terjebak pada demokrasi prosedural yang cenderung menjauhi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan jatidiri bangsa daripada demokrasi substansial.

Praksis demokrasi di Indonesia hanya terbatas pada ruang diskusi, prosedur pemerolehan keadilan, serta segala instrumen lain yang cenderung formalistik, hanya memenuhi prosedur administratif dan mengesampingkan esensi. Akibatnya terjadi persoalan-persoalan yang dapat mengganggu stabilitas nasional, seperti mahalnya kejujuran dalam berdemokrasi, terjadinya saling tikam antar politisi, serta penegakkan kebenaran semu atas nama kebebasan. Maka dari itu, mari kita renungkan kembali, apakah benar demokrasi kita adalah demokrasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila? Ataukah demokrasi bar-bar yang berdiri diatas paham kebebasan?

Melihat potret demikian, dapat dikatakan bahwa demokrasi kita sudah mulai tercerabut dari akar budaya bangsanya. Seyogyanya, demokrasi harus mampu hidup dan berkembang dalam kerangka Pancasila yang sarat nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, hikmat kebijaksanaan demi tercapainya keadilan sosial yang menampilkan kesantunan, toleransi, menghargai perbedaan, serta kemampuan untuk hidup bergotong-royong. Disadari atau tidak, liberalisme yang sarat nuansa individualistik dan sekularisme yang menempatkan rasionalitas diatas segalanya tengah menyerang sendi-sendi kehidupan demokrasi kita. Karena itu, untuk dapat mengembalikan apa yang disebut Bung Karno sebagai demokrasi "ala Indonesia" perlu dipahami bersama bahwa demokrasi Indonesia yang sarat nilai-nilai Pancasila amat berbeda dengan demokrasi barat yang lebih mengedepankan rasionalitas.

Demokrasi Indonesia (baca: Demokrasi Pancasila) adalah demokrasi yang: (1) didasarkan pada hati nurani, (2) menjunjung tinggi kesetaraan dan kebebasan dalam kerangka negara hukum, (3) proses komunikasi diawali dengan kejujuran atas dasar kelapangdadaan, kerendahan hati, dan kelegaan hati, (4) memantapkan rasionalitas dengan keyakinan dan hati nurani, (5) mengakomodir kepentingan semua kalangan secara sukarela atas dasar moral spiritual, (6) kolektivitas dibangun atas dasar keyakinan



pada Tuhan dan kepercayaan tuhan pada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, (7) keberagaman dimaknai sebagai totalitas yang didasarkan pada entitas keberagaman, (8) perbedaan pendapat diselesaikan atas dasar hikmah kebijaksanaan yang merupakan hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan keyakinan pada petunjuk Tuhan yang diwujudkan melalui ilmu, amal, keikhlasan dan kerendahan hati, (9) calon pemimpin merupakan seorang yang berilmu, bijaksana, serta mempunyai keyakinan terhadap Tuhan YME, (10) paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik demokrasi bersifat holistik dan filosofis.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila ini mari kita renungkan bersama. Apakah kita akan tetap menjalankan ritual demokrasi prosedural yang mengesampingkan nilai-nilai kebijakan Pancasila ataukah berbenah diri untuk mulai mempraktekan demokrasi Pancasila yang sarat nilai etika? Wallahuallambisawab.



# DEMOKRASI PANCASILA

- Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila) adalah demokrasi yang;
- 1. Didasarkan pada hati nurani
- 2. Menjunjung tinggi kesetaraan dan kebebasan dalam kerangka negara hukum.
- 3. Proses komunikasi diawali dengan kejujuran atas dasar kelapangdadaan, kerendahan hati, dan kelegaan hatiMematangkan rasionalitas dengan keyakinan dan hati nurani
- 4. Mengakomodir kepentingan semua kalangan secara sukarela atas dasar moral spiritualKolektivitas dibangun atas dasar keyakinan pada Tuhan dan kepercayaan utuh pada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- 5. Keberagaman dimaknai sebagai totalitas yang didasarkan pada entitas keberagaman.
- 6. Perbedaan pendapat diselesaikan atas dasar hikmah kebijaksanaan yang merupakan hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan keyakinan pada petunjuk Tuhan yang diwujudkan melalui ilmu, amal, keikhlasan dan kerendahan hati.
- 7. Calon pemimpin merupakan seorang yang berilmu, bijaksana, serta mempunyai keyakinan terhadap Tuhan YME.
- 8. Paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktek demokrasi bersifat holistik dan filosofis.



Sanusi (1998) mengidentifikasi 10 pilar  
**DEMOKRASI** konstitusional menurut UUD 45

1. Demokrasi yg berketuhanan yang maha esa (Udin S)
2. Demokrasi dg kecerdasan
3. Demokrasi yg berkedaulatan rakyat
4. Demokrasi dg rule of law
5. Demokrasi dg pembagian kekuasaan negara
6. Demokrasi dg HAM
7. Demokrasi dg pengadilan yg merdeka
8. Demokrasi dg otonomi daerah
9. Demokrasi dg kemakmuran
10. Demokrasi yg berkeadilan sosial

# SESAT PIKIR DEMOKRASI INDONESIA

- Demokrasi hanya dimaknai sebagai konsep “KEBEBASAN” semata yang melahirkan sikap dan perilaku bebas nilai (*value free*), padahal sejatinya demokrasi tidak bebas nilai.

**INGAT, “Kebebasan kita, dibatasi kebahagiaan orang lain”**

- Demokrasi hanya ramai ketika menjelang pemilihan umum (Pilpres, Pileg, & Pilkada)  
**Pemikiran mengenai demokrasi Pancasila hanya berhenti pada tataran konseptual. Demokrasi hanya sebatas prosedur pencapaian kekuasaan, seringkali berbagai cara dilakukan dengan dalih “demokrasi”**
- “Demokrasi” ditempatkan sebagai tujuan kehidupan bernegara (terkesan dianggap sebagai ideolog), padahal yang menjadi tujuan bernegara adalah membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, yang adil berdasarkan Pancasila.
- Praksis demokrasi hanya terbatas pada ruang diskusi yang berujung pada pemungutan suara (*votting*), prosedur pemerolehan keadilan, serta segala instrumen lain yang cenderung formalistis, hanya memenuhi prosedur administratif dan mengesampingkan esensi. Akibatnya terjadi persoalan-persoalan yang dapat mengganggu stabilitas nasional, misalnya saling hujat antar lembaga negara, saling tikam antar politisi, dan penegakkan kebenaran semu atas nama kebebasan. Maka dari itu, mari kita renungkan kembali, apakah benar demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila? Ataukah demokrasi bar-bar yang berdiri diatas faham kebebasan?
- Disadari atau tidak, liberalisme yang sarat nuansa individualistik dan sekularisme yang menempatkan rasionalitas diatas segalanya tengah menyerang sendi-sendi kehidupan demokrasi
- Jikapun mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup (Bung Karno, 1956)



# **PENDIDIKAN DEMOKRASI**

**UPAYA SISTEMATIS YANG DILAKUKAN NEGARA DAN MASYARAKAT UNTUK MEMFASILITASI INDIVIDU WARGANEGARA AGAR MEMAHAMI, MENGHAYATI, MENGAMALKAN, DAN MENGEMBANGKAN KONSEP, PRINSIP, DAN NILAI DEMOKRASI SESUAI DENGAN STATUS DAN PERANNYA DALAM MASYARAKAT (WINATAPUTRA, 2006) SEHINGGA MENJADI WARGANEGARA YANG **TAHU, MAU, DAN MAMPU** MELAKSANAKAN DAN MENCIPTAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI**



# BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT?





**TERIMA KASIH**